

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan partai politik di Indonesia menjadi warna dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Partai politik merupakan lembaga penyalur kepentingan. Lembaga yang menyalurkan kepentingan atau aspirasi masyarakat dan juga kepentingan penguasa. Partai politik telah mengubah hubungan antara masyarakat dan penguasa. Partai politik sendiri merupakan penyangga berjalannya demokrasi. Selama demokrasi dianggap mampu dan dianggap sebagai suatu cara yang bijaksana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maupun kesejahteraan rakyat maka keberadaan partai politik tidak bisa di pungkiri lagi. Partai-partai politik menyatukan orang-orang yang memiliki pandangan atau pemikiran dan kepentingan-kepentingan yang sama.¹ Partai politik menjalankan berbagai macam peran dan fungsi. Partai politik membantu memfokuskan atau menyederhanakan pilihan pemilih terhadap program-program kebijakan yang pantas untuk dipilih. Bagi pemerintah peran partai politik sebagai penyedia pengikut atau pendukung politis yang cukup stabil agar dapat membantu melaksanakan program-program setelah mereka terpilih. Sedangkan bagi orang-orang yang mempunyai komitmen dengan dunia politik, partai politik dapat membarikan kesempatan untuk terlibat dalam masalah-masalah publik.

¹ Beetham David dan Kevin Boyle, 2000, *Demokrasi 80 tanya jawab*, Yogyakarta: kanisius. hal 31

Partai politik cenderung lebih mementingkan kepentingan partai atau kelompoknya masing-masing dan bukan mementingkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Selain memperjuangkan kepentingan rakyatnya, partai politik juga mrnyuguhkan konflik internalnya dan juga perebutan kekuasaan yang makin hari semakin terasa sengit.² Padahal kepentingan masyarakat selalu menjadi hal yang utama bagi partai-partai politik terutama pada saat berkampanye pada pemilu. Sebagai akibat dari terjadinya ketidak setabilan sistem politik dan kemasyarkatan yang dapat dilihat dari tidak berfungsinya partai politik itu sendiri. Suara masyarakat tidak tersampaikan dengan baik yang berakibat setiap kebijakan politik yang dilakukan tidak berpihak kepada masyarakat tetapi melainkan lebih terasa berpihak kepada kepentingan segelintir orang ataupun kepentingan golongan saja. Sehingga banyak menimbulkan pendapat masyarkat bahwa orang partai dianggap sebagai penipu, orang yang suka menebar janji, orang yang gila kekuasaan, serta ada juga pendapat bahwa orang partai orang yang selalu menjual kepentingan umum bagi kepentingan mereka sendiri.

Buruknya citra partai saat ini tidak lepas dari beragam sikap dan langkah yang di tampilkan di hadapan publik selama ini. Kinerja partai politik dalam segala bidang kegiatan lumpuh. Sementara itu, perpecahan di dalam partai serta dugaan keterlibatan anggota-anggotanya di dalam perkara korupsi menjadikan publik cenderung menilai negatif partai politik. Citra partai politik di nilai buruk oleh 52,7 persen responden jajak pendapat ini, lebih buruk di

²Warsito Tulus, 1999, *Pembangunan politik refleksi kritis atas krisis*, Yogyakarta: BIGRAF publishing. hal 94

bandingkan 48,5 persen penilaian serupa yang disampaikan pada september 2005.³

Walaupun tidak semua pendapat itu benar, namun beberapa alasan yang mendorong timbulnya pemikiran tersebut didasarkan pada hal-hal yang wajar. Siapapun pasti dengan mudah menyetujui bahwa hanya pada saat kampanye pemilu saja para orang-orang partai dengan segala janji-janjinya mendekati masyarakat agar mau mendukung dan memilih partai mereka.

Partai politik sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses demokrasi di bangsa ini. Partai politik menurut Sigmund Neumann merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih besar.⁴ Akan tetapi sering terjadi gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malah menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Misinformasi semacam itu menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat.

Peran partai politik untuk memberikan bekal atau pendidikan politik sangat penting apalagi untuk menekan angka golput dalam pesta demokrasi. Untuk yang sudah memahami politik memang tidak menjadi masalah sedangkan bagi yang tidak memahami politik terutama dari kader partai akan mengakibatkan kinerja partai menjadi tidak maksimal. Dengan kondisi dan situasi seperti ini pemilu bisa memang dibilang memang menjadi pesta yang

³ www.antikorupsi.org dengan judul wajah kusam partai politik di akses pada tanggal 26/3/2014 pukul 21:23 wib.

⁴ Budiardjo Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hal 406.

benar-benar sebuah pesta semata, sedangkan pembelajaran politiknya sendiri masih berjalan dengan lambat dan tersendat-sendat.

Peran partai politik melihat kembali peran dan tugas yang diembannya. Aktivitas politik perlu dibingkai dalam suatu lembaga formal yang memungkinkan aspirasi politik suatu kelompok diperjuangkan dalam suatu sistem formal. Jadi, mutlak terdapat kebutuhan untuk mensistematis kepentingan dan aspirasi masyarakat.⁵

Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan. Adapun ketiga kegiatan itu meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi (legislative atau yudikatif).⁶ Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik yang tidak memperoleh mayoritas suara di badan perwakilan rakyat akan berperan sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas.

Demikian juga fungsi partai politik sebagai pengontrol kinerja lembaga eksekutif, selalu mendapat respon kurang memuaskan. Berdalih memberikan contoh pendidikan politik yang baik, kader partai politik yang duduk di DPR/DPRD malah menunjukkan perilaku tidak disiplin. Bahkan, mempertontonkan kemewahannya ditengah penderitaan masyarakat.

Pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah, legislatif maupun presiden saat ini memang lebih banyak menjadi pesta semata, tidak heran

⁵ Firmanzah Ph. D, 2008, *mengolah partai politik komunikasi dan posting ideologi politik di era demokrasi*, jakarta: yayasan obor Indonesia. hal 69

⁶ Surbakti Ramlan, 1992, *memahami ilmu politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. hal 116

jikalau angka golput menjadi pilihan dari sebagian masyarakat. Sedangkan golput sendiri bukan pilihan yang melanggar hukum yang pada akhirnya pilihan golput akan menjadi salah satu keputusan karena apatisme dengan situasi politik secara umum yang berjalan tanpa arah yang kurang jelas. Khusus yang memilih golput pada dasarnya berwawasan nasionalis, karena dari masyarakat agamis pada umumnya sudah mempunyai pilihan partai politik yang berbasis agama, sehingga partisipan untuk memilih menjadi lebih tinggi.

Dalam sejarah Indonesia, Golongan putih (Golput) sudah ada sejak rakyat mengenal proses pemilihan langsung. Kebebasan memilih sesungguhnya adalah sifat dasar manusia. Golput selalu ada meskipun terkadang masih sesuai dengan lingkungan sekitarnya.

Masyarakat banyak yang memilih langkah menjadi pemilih golput dikarenakan beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya tidak pergi ke TPS karena bingung atau minimnya informasi khususnya masyarakat pedalaman, ada pula pemilih yang tidak mau lagi memikirkan politik karena tidak percaya kepada kandidat-kandidat, atau merasa kecewa dengan calon yang melakukan korupsi atau calon yang tidak menepati janji setelah menang dalam pemilihan suara.

Demikian pula yang terjadi di kabupaten Mojokerto pada pemilihan legislatif tercatat partisipasi pemilih Berdasarkan data dari KPU, angka partisipasi pemilih dalam pemilu calon Legislatif pada tahun 2004 berjumlah 84%. Sementara pada pemilu tahun 2009 jumlahnya menurun menjadi 71%

dan pada tahun 2014 jumlah daftar pemilih 821.149 yang ikut berpartisipasi sebanyak 83,27%.⁷ Dengan melihat kondisi tersebut peran partai politik mampu menjalankan perannya dengan baik terutama dalam melakukan bekal atau pendidikan politik kepada masyarakat agar pada saat pemilihan berlangsung masyarakat bisa menggunakan haknya dengan baik dan bisa sedikit menekan angka golput.

Berbicara tentang mengenal partai politik, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan partai demokrat. Partai demokrat merupakan partai politik di Indonesia yang berdiri pada tanggal 9 september 2001 dan disahkan pada tanggal 27 agustus 2003. Partai demokrat didirikan karena erat kaitannya dengan pendiri partai yang berniat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada saat itu menjabat sebagai menteri koordinator politik dan keamanan di bawah presiden megawati. Karena itulah yang membuat partai demokrat lekat dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono.

Partai ini pertama kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 dan meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.255) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Dengan perolehan tersebut, partai demokrat meraih peringkat ke 5 pada pemilu legislatif 2004. Menjelang pemilu tahun 2004, popularitas partai ini cukup terdongkrak dengan naiknya popularitas Yudhoyono waktu itu. Bersama PKS, partai ini menjadi *the rising star* pada pemilu kedua di era reformasi itu. Popularitas partai ini terutama berada di kota-kota besar, dan di wilayah eks karesidenan Madiun, tempat Yudhoyono berasal.

⁷ KPU kabupaten Mojokerto

Sedangkan hasil pemilu 2009, partai Demokrat menjadi pemenang pemilu legislatif 2009. Partai Demokrat memperoleh 150 kursi (26,4%) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%). Partai Demokrat meraih suara terbanyak di banyak provinsi, hal yang ada pada pemilu sebelumnya tidak terjadi, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.⁸

Partai politik saling berlomba meraup jumlah suara besar agar dapat duduk di kursi DPR dan DPRD. Pada pemilu 2009 lalu partai demokrat berhasil memimpin perolehan suara, namun tidak di pemilu 2014 mendatang. Media survei nasional (median) menempatkan partai berlambang mercy ini di posisi keempat. Sementara, PDIP memperoleh 21,4%, disusul partai Golkar 17,8%. Sisanya ditempati partai Gerindra 6,2%, Demokrat 5,7%, PKB 5%, dan Hanura 4,8%. Dengan angka tersebut, partai yang sebagian besar tergabung dalam koalisi pemerintah berpotensi saling menyalap.⁹

Perolehan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 secara nasional. Dalam hasil tersebut, PDI Perjuangan memperoleh suara paling tinggi dengan 23.681.471 suara atau 18,95 persen. Partai kedua yang memperoleh suara tertinggi adalah Partai Golkar dengan 18.432.312 suara atau 14,75 persen. Sedangkan Gerindra memperoleh 14.760.371 suara atau 11,81 persen dan Partai Demokrat meraih 12.728.913 suara atau 10,19 persen.¹⁰

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/partai_Demokrat di akses pada tanggal 6 maret 2014 pukul 10.02 wib

⁹ <http://www.merdeka.com/politik/survei-demokrat-berpotensi-disalip-hanura-dan-gerindra.html> diakses pada tanggal 6 maret 2014 pukul 12.15 wib

¹⁰ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/10/n5bgv5-ini-hasil-lengkap>

rekapitulasi-perolehan-suara-pileg-2014 pada tanggal 25 mei pukul 00.36 wib

Hasil tersebut bisa saja merupakan akibat dari permasalahan yang terjadi pada partai Demokrat itu sendiri. Permasalahan partai demokrat mulai mengemuka setelah bendahara umum partai demokrat dijadikan tersangka korupsi pembangunan wisam atlet di Palembang. Bahkan, bendahara partai demokrat tersebut sempat di buru interpol, kepolisian, dan KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatnya menerima fee suap dari proyek SEA GAMES 2011. Bendahara demokrat juga memberikan banyak keterangan melibatkan beberapa anggota partai. Setelah itu tokoh partai demokrat yang juga sebagai menpora mengundurkan diri sebagai menteri pemuda dan olahraga pada 7 desember tahun 2012 krena ditetapkan sebagai tersangka kasus hambalang. Sementara ketua umum mengundurkan diri sebagai ketua umum partai demokrat setelah menandatangani pakta integritas pada 14 februari 2013 yang menyatakan siap mundur apabila ditetapkan sebagai tersangka korupsi, yang kemudian diikuti penetapan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 februari 2013, Anas mundur sebagai ketua umum partai Demokrat, sehingga menimbulkan kekosongan kursi ketua umum. Namun, ia menjelaskan bahwa tanpa pakta integitas pun, dia punya kesadaran untuk mundur. Sebelumnya tokoh politik partai demokrat lain telah terlebih dahulu menjadi tersangka korupsi.

Di Kabupaten Mojokerto partai demokrat juga bukan tanpa masalah karena di Kabupaten Mojokerto sendiri terjadi masalah dimana ketua DPP partai demokrat terkait kasus dugaan pemalsuan ijasah dan juga daftar riwayat hidup. Dari latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui secara mendalam

tentang peran partai demokrat dalam mengurangi angka golput dikab Mojokerto, sehingga menekan angka golput dan juga mampu meningkatkan popularitas partaidemokrat sendiri. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui problem yang dialami partai dalam melaksanakan perannya ikut mengurangi angka golput. Maka dari itu saya sebagai peneliti mengangkat judul “ **Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Suara Partisipasi Basis Partai. (Studi di DPC Partai Demokrat di Kabupaten Mojokerto)**”. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran tentang perlunya partai politik untuk menjalankan perannya dalam ikut serta mengurangi angka golput demi terwujudnya demokrasi yang baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Partai Demokrat dalam meningkatkan suara partisipasi basis partai di Kab.Mojokerto?
2. Apakah problem yang di hadapi oleh partai demokrat dalam mengurangi meningkatkan partisipasi basis suara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Partai Demokrat dalam meningkatkan partisipasi basis partai.
2. Untuk mengetahui apa saja problem yang di hadapi oleh Partai Demokrat dalam meningkatkan partisipasi basis partai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Memberi pengetahuan kepada mahasiswa tentang peran partai politik khususnya partai Demokrat serta lembaga-lembaga masyarakat dalam

meningkatkan partisipasi basis partai. Dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi program perbaikan partai politik dalam mengurangi angka golput.

2. Manfaat teoritis

Dapat menambah pengetahuan penulis dan mahasiswa lainnya terhadap peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi basis partai. Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran terhadap pengembangan ilmu sosial terutama dalam mata kuliah SISTEM KEPARTAIAN, PARTAI POLITIK, dan juga SISTEM POLITIK.

E. Definisi Konseptual

1. Pengertian Partai Politik

Carl J. Friedrich: partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.¹¹

2. Pengertian Partisipasi Politik

Kevin R. Hardwick dalam Deden faturohman dan Wawan sobari (2003) menjelaskan partisipasi politik sebagai upaya memberi perhatian pada cara-cara warga negara dalam berinteraksi dengan pemerintah, dimana warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar kepentingan tersebut bisa terwujud. Indikatornya

¹¹ Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hal 405

ialah terdapat interaksi antar warga negara dengan pemerintah serta terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.¹²

F. Definisi Oprasional

Secara umum operasional dipahami sebagai batasan jangkauan atau ruangan lingkup yang kaitannya dengan penelitian. Menurut Sanapiah Faisal, bukankah keperluan mengkomunikasikan semata-mata kepada pihak lain, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, tetapi juga menuntun penelitian itu sendiri didalam menangani rangkaian penelitian, misalnya dalam menyusun instrumen atau variabel-variabel yang hendak diteliti dan juga dalam menetapkan populasi, sampel, serta didalam menginterpretasikan hasil penelitian.

Dengan demikian, definisi operasional merupakan penetapan dari indikator-indikator yang akan dipelajari dan dianalisa, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang jelas. Berdasarkan judul yang akan peneliti diangkat maka ada beberapa indikator-indikator yang akan dipelajari dan dianalisa yaitu:

1. Peran partai demokrat
 - a. Pendidikan internal partai demokrat
 - b. Pendidikan eksternal partai demokrat
2. Problem yang di hadapi partai demokrat dalam meningkatkan partisipasi basis partai.
 - a. Pesimisme dan Ketidak Percayaan Masyarakat
 - b. Tingkat Pendidikan Masyarakat
 - c. Keuangan Partai

¹²Faturohman Deden dan Wawan Sobari.2003. pengantar ilmu politik. Malang. UMM Press. Halaman 185

d. Kurang akuratnya DPT

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif dengan berusaha memberikan gambaran keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis serta lisan dari orang-orang yang diamati. Serta penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan DPC partai Demokrat kabupaten Mojokerto untuk mengetahui peran partai Demokrat dalam mengurangi angka golput.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang nantinya akan memberikan informasi dalam penelitian ini adalah merupakan orang-orang yang bersangkutan dengan partai politik yang menjadi bahan studi kasus penelitian ini. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian ialah DPC Partai Demokrat, tokoh politik partai Demokrat.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti ini peneliti menggunakan sumber data atau informasi yang menjadi perhatian untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka sumber data yang dipergunakan untuk menyediakan informasi ialah :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti atau didapatkan langsung dari obyek yang diteliti adalah program kerja partai Demokrat guna berperan dalam mengurangi angka golput sehingga memberi pengaruh terhadap pemilih di Kabupaten Mojokerto.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip, buku-buku literatur, internet yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Yang ada kaitannya antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Untuk mengumpulkan data diperlukan instrumen atau alat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Teknik ini memberikan informasi kepada penulis mengenai fakta yang terjadi pada instansi dalam

menjalankan aktifitas atau kinerjanya yang kemudian melakukan pencatatan mengenai fakta tersebut.

b. Interview/wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penyusun dilakukan secara langsung, dan wawancara yang dimaksud ialah pertemuan antara periset dan responden, dimana jawaban responden akan menjadi data mentah.¹³ Dalam hal ini penulis dalam memperoleh data langsung pada informasi atau responden yang bersangkutan dengan melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh kejelasan mengenai peran partai Demokrat dalam mengurangi angka golput di Kab Mojokerto.

c. Dokumentasi

Peneliti melakukan pengumpulan data juga dengan menggunakan dokumentasi data sekunder yang berupa catatan, buku, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, surat kabar atau majalah. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan yang menunjang secara teoritis terhadap topik penelitian mengenai peran partai politik dalam mengurangi angka golput. Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu mendokumentasikan gambar-gambar saat penelitian. Dan juga gambar-gambar kegiatan partai.

H. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisa dengan melakukan pemaparan

¹³Harrison Lisa, 2007, *Metodelogi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Grup. Hal 104

serta penjelasan secara mendalam. Dari penelitian ini, maka data akan dianalisa dengan menggambarkan keadaan obyek berdasarkan data obyektif, sehingga data-data yang dapat disimpulkan setelah analisa. Adapun tahapan dalam menganalisa data sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dengan cara mengedit data yaitu memeriksa data yang terkumpul berkenaan dengan kelengkapan-kelengkapan dan kebenaran siap untuk diproses. Adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data primer maupun data sekunder yang dianalisa secara kualitatif yang bertujuan untuk mengolah data agar data tersebut bisa berbicara dan mempunyai makna yang jelas.
- b. Pengolaan data penyajian data dilakukan setelah data terkumpul dilasifikasikan dengan berbagai kebutuhan, kemudian dilakukan pengelolaan data dengan cara mengklasifikasikan dalam bentuk uraian.
- c. Dengan demikian proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang kemudian dilakukan reduksi data (menyatukan teori kedalam konsep) yang dilakukan dengan membuat rangkuman ini penelitian tersebut. Dalam upaya mendapatkan data yang valid atau sah, peneliti menambah waktu kehadiran. Peneliti sebagai instrument utama dalam proses pengumpulan data yang membuat peran serta untuk turun langsung sangat membantu peneliti untuk meminimalisir distorsi data. Dalam jangka waktu penelitian tersebut peneliti bisa memahami bagaimana peran partai politik dalam mengurangi angka golput agar dapat terungkap sehingga distorsi yang berupa subyektivitas peneliti sedikit

demi sedikit berkurang, yang secara otomatis berdampak pada obyektivitas sebagai salah satu standar validitas data.

